

BAB III

UPAYA GREENPEACE DALAM MENANGANI DEFORESTASI DI PAPUA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Pada BAB III ini, penulis menjelaskan upaya Greenpeace dalam memerangi deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo, seperti kampanye, pendanaan, dan peran Greenpeace dalam Kerjasama internasional untuk melindungi hutan Papua.

3.1 Petition

Petisi memiliki sejarah di beberapa negara, di Inggris petisi digunakan untuk menyelesaikan keluhan probadi dan local terhadap mahkota, sedangkan di Amerika petisi digunakan sebagai jaminan dasar kebebasan sipil. Petisi adalah instrumen tertulis yang ditujukan kepada individu, pejabat, dan legislator untuk membantu public dengan keluhan yang diketahui di masyarakat. Petisi juga bisa mnejaditanda tangan yang menyetakan dukungan terhadap tujuan masyarakat.³⁸

Kelambanan dan keagalan negara dalam mengakomodir hak aspirasi rakyat memaksa masyarakat untuk memilik cara melakukan demonstrasi, namun seiring berjalannya waktu, demonstrasi dianggap tidak efektif dan masyarakat mempertimbangkan cara lain untuk menyampaikan keinginannya melalui metode himbauan.³⁹ Misalnya, Greenpeace percaya bahwa petisi memiliki potensi besar

³⁸ Britanica, *Petition*, dikases dalam <https://www.britannica.com/topic/petition-law> (28/3/2023 21:33 WIB)

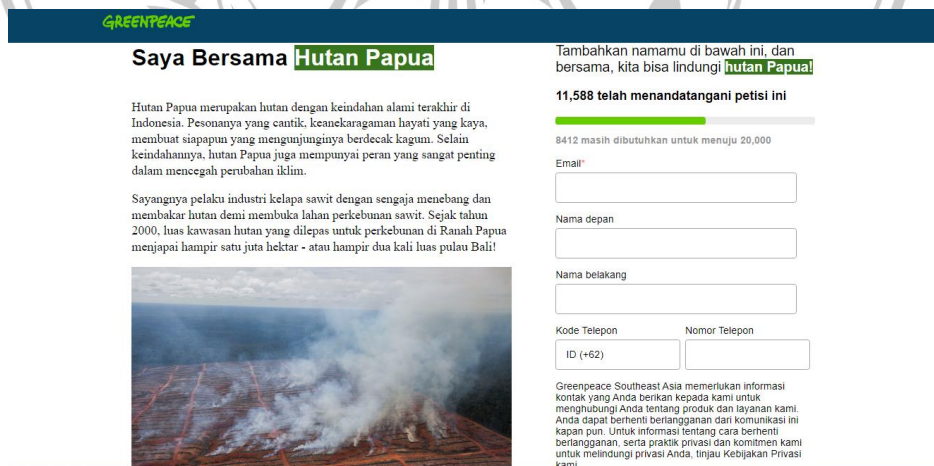
³⁹ Moch. Marsa Taufiqurrohman dkk, *Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan*

sebagai bentuk partisipasi dan harus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam strategi politik pemerintah.

3.1.1 Petition Saya Bersama Hutan Papua

Petisi Saya Bersama Hutan Papua yang dikeluarkan oleh Greenpeace yang bekerjasama dengan Forensic Architecture yang semakin memprihatinkan dalam beberapa decade terakhir. Kemudian 2 INGO ini bekerja sama untuk menentukan apakah kebakaran hutan itu disengaja akibat dari tindakan masyarakat atau perluasan perkebunan.

Dengan disahkannya Undang-Undang cipta Kerja atau Omnibus Law, pelaku usaha besar bisa mendapatkan keleluasan lebih dalam penyelenggaraan negara tanpa sanksi yang berat. Banyaknya masyarakat adat Papua yang masih bergantung hidupnya pada hutan akan dirampas haknya. Mereka kemudian menggunakan cara-cara korup dan curang untuk berusaha memperluas perkebunan kelapa sawit mereka.



GREENPEACE

Saya Bersama Hutan Papua

Hutan Papua merupakan hutan dengan keindahan alami terakhir di Indonesia. Pesonanya yang cantik, keanekaragaman hayati yang kaya, membuat siapapun yang mengunjunginya berdecak kagum. Selain keindahannya, hutan Papua juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah perubahan iklim.

Sayangnya pelaku industri kelapa sawit dengan sengaja menebang dan membakar hutan demi membuka lahan perkebunan sawit. Sejak tahun 2000, luas kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan di Ranah Papua menajapai hampir satu juta hektar - atau hampir dua kali luas pulau Bali!

Tambahkan namamu di bawah ini, dan bersama, kita bisa lindungi **hutan Papua!**

11,588 telah menandatangani petisi ini

8412 masih dibutuhkan untuk menuju 20,000

Email*

Nama depan

Nama belakang

Kode Telepon Nomor Telepon

ID (+62)

Greenpeace Southeast Asia memerlukan informasi kontak yang Anda berikan kepada kami untuk menghubungi Anda tentang produk dan layanan kami. Anda dapat berhenti berlangganan dari komunikasi ini kapan pun. Untuk informasi tentang cara berhenti berlangganan, serta praktik privasi dan komitmen kami untuk melindungi privasi Anda, tinjau Kebijakan Privasi kami.

Gambar 3.1 Petisi Saya Bersama Hutan Papua

Berpendapat, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 18 No. 1 Maret 2021, Diakses dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/750/pdf>, hal. 7-8

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa terdapat penenbangan hutan yang dilakukan secara sengaja yang ditunjukkan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan mulai dari tahun 2000. Tidak hanya itu, terjadi internasional menganalisis 32 perusahaan di Tanah Papua. Akibatnya Greenpeace menemukan bahwa sebagian besar perusahaan melakukan pelanggaran.⁴⁰

3.2 Campaign

3.1.1 Campaign Save Papua

Campaign Save Papua Forest ini dilakukan oleh aktivis Greenpeace Indonesia menentaskan teater kebakaran hutan Papua di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada 8 April 2021. Aktivis juga mengirimkan Menteri laporan Greenpeace baru-baru ini, Lisensi untuk membersihkan sisi gela perizinan di Papua Barat dan meminta pemerintah untuk mencabut izin banyak penebangan kayu Papua.



Gambar 3.2 Campaign Greenpeace Save Papua Forest

⁴⁰ Grrenpeace, Saya Bersama Hutan Papua, diakses dalam https://act.seasia.greenpeace.org/id/saya-bersama-hutan-papua?_ga=2.9706674.60939244.1677423251-1556327745.1653923452, (28/02/2023, 17:50 WIB)

Pada Gambar 3.2 Greenpeace yang melakukan kampanye dengan memegang poster-poster untuk yang menuntut diberhentikan pemberian izin deforestasi yang menyebabkan kerusakan hutan Papua. Dengan terus menerus pemberian izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan terus menerus kerusakan dan hilangnya hutan Papua.⁴¹ Tindakan ini didasarkan pada laporan “License to Clear” Greenpeace International yang dirilis pada 6 April 2021, yang mengungkapkan dugaan pelanggaran sistematis izin perkebunan dan deforestasi di Papua antara 2011 dan 2019. Selain itu, inisiatif konservatif lahan gambut dan inisiatif kehutanan yang dihancurkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk moratorium hutan dan moratorium kelapa sawit, telah gagal mewujudkan reformasi yang dijanjikan.⁴²

3.1.2 Campaign Jelajah Harmoni Nusantara

Pada tanggal 12 Maret 2018 berlayar ke Papua melakukan tur untuk melakukan kampanye penyelamatan lingkungan oleh Masyarakatserta mencari mencari inspirasi dari Masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan alam nusantara. Kota pertama yang dituju adalah Monokoari dengan tema “Jelajah Harmoni Nusantara”.⁴³

Aktivis Greenpeace Indonesia Charles Taaru mengatakan “Pemerintah harus segera menerapkan kehutanan berbasis Masyarakat di seluruh Papua, karena masyarakat adat dapat berperan sebagai garda depan melawan deforestasi di

⁴¹ Jurnasyanto Sukarno, Save Papua Action in Jakarta, Diakses dalam <https://media.greenpeace.org/collection/27MDHU89NCR>, (25/02/2023, 16:03 WIB)

⁴² Yudha Baskoro, Save Papua’s Forest: Greenpeace, diakses dalam <https://jakartaglobe.id/vision/save-papuas-forests-greenpeace/>, (28:02/2023, 16:57)

⁴³ Greenpeace, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1121/kapal-greenpeace-rainbow-warrior-berlayar-ke-papua-mendukung-hutan-adat/>, (18/01/2024, 00.17 WIB)

Papua”. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang melaksanakan program perhutanan sosial dengan target luas 12,7 juta hektar tahun 2019 di seluruh Indonesia. Dasarnya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang perhutanan Sosial. Dalam peraturan ini, perhutanan sosial terdiri dari berbagai macam skema diantaranya adalah hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, hutan Masyarakat, hutan adat, dan hutan desa.

Menurut Charles, rencana perhutanan sosial di Papua cocok untuk konvensional karena masyarakat sudah hidup turun temurun dan ratusan tahun memanfaatkan hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan budaya. “perhutanan sosial paling baik diterapkan di Papua dengan sistem batas yang konvensional,” katanya.

Bambang Suprianto yang merupakan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan Gerakan lingkungan hidup harus terkespresikan di Indonesia, seperti halnya Greenpeace. “Dibutuhkan gerakan masyarakat untuk menyelamatkan hutan Indonesia dan menjaga lingkungan hidup, dan saat ini Greenpeace bersama anggota dari berbagai negara di dunia membantu melakukan pemungutan suara terhadap gerakan masyarakat di atas kapal Raibbow Warrior,” kata Bambang.

Kunjungan Greenpeace juga menarik perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat. Saat mengunjungi kapal Rainbow Warrioir, Wakil Gubernur Mengapresiasi kedatangan kelompok Greenpeace di Papua Barat. Ia mengatakan bahwa “kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap promosi

program konservasi di Papua Barat.”Rainbow Warrior akan menetap di Monokowari selama tiga hari, setelah itu akan melanjutkan perjalanan ke Sorong, Raja Ampat dan dari san amelalui Laut Jawa menuju Bali dan Jakarta. ⁴⁴

3.2.2 Video Campaign “Palm Oil in Papua: A Burning Issue a Greenpeace Investigation”



Gambar 3.3 Campaign “Palm Oil in Papua: A Burning Issue a Greenpeace Investigation

Gambar diatas memperlihatkan Campiagn Greenpeace berupa video yang diunggah melalui kanal youtube Greenpeace berjudul “Palm Oil In Papua: A Burning Issue”⁴⁵ dimana dalam kampanye ini membahas bagaimana perusahaan kelapa sawit yang merusak lingkungan terutama menggunakan api atau kebakaran hutan dengan sengaja yang mengakibatkan banyak satwa yang terancam dan menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak dan membahayakan lingkungan dan juga hingga mencapai ke negara tetangga seperti Filipin, Malaysia, dan Papua .

⁴⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://ksdae.menlhk.go.id/info/2955/green-peace-ke-papua-untuk-dukung-hutan-adat.html>, (18/01/2024, 00:20)

⁴⁵ Youtube, Palm Oil In Papua: A Burning Issue, Greenpeace, diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=9jVb_cYC_Ik (2503/2023 23:45 WIB)

Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan hutan agar dapat ditanaman kelapa sawit kedepannya.

Pembangunan pertanian khususnya kelapa sawit menjadi alasan utama dari kebakaran hutan. Studi dari Greenpeace International dan Forensic Architecture menunjukkan bahwa lahan milik salah satu perusahaan, Korindo, menyebabkan kebakaran karena penggunaan yang disengja. Kebakaran itu rupanya digunakan untuk membuka lahan di salah satu konsesi Korindo di Papua, Provinsi paling Timur Indonesia.

3.3 Greenpeace dan Kerjasama dalam Melindungi Hutan Papua

3.3.1 Indigeous People

Perwakilan masyarakat adat Papua Indonesia berpartisipasi pada 3-17 Desember 2022 di Konfrensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau CBD COP15 di Montral, Kanada. Bersama dengan masyarakat adat dari beberapa negara seperti Joir, Republik Demokratik Kongo, Kanada, dan Kamerun, mereka menyampaikan harapan dan perlindungan kenekaragaman hayati yang dibahas dalam forum ini.



Gambar 3.4 Indigenous People

Perusahaan sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) yang ingin berinvestasi di kawasan Nimbokrang, Jayapura yang diduga melakukan penebangan liar terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Pemerintah harus mengakui hak dan pengetahuan kami dan melanjutkan apa yang telah masyarakat adat lakukan untuk menjaga dan melindungi hutan yang berguna untuk masyarakat adat dan makhluk lain di bumi.

CBD adalah momen yang akan menentukan bagaimana kebijakan nasional melindungi alam dan keanekaragaman hayati dalam dekade mendatang. Indikator keberhasilan negosiasi ini adalah berapa banyak masyarakat adat dan pengetahuan mereka ditempatkan di pusat setiap kebijakan dan tindakan,” kata sejarawan Banjaran Aji, kampanye hutan Manajer Greenpeace Indonesia di Montreal. Sayangnya, delegasi Indonesia pada konferensi COP 15 CBD menyatakan ketidaksetujuannya dengan

prinsip 30x30, atau tujuan global untuk melindungi setidaknya 30 persen daratan dan 30 persen permukaan pada tahun 2030.⁴⁶

Secara lebih khusus, pada tahun 2018 masyarakat adat Namblong, Kemtuig dan Klis duwakili di Kantor Kecamatan Tabri oleh Matthew Sawa, Presiden Dewan Adatan Namblong (DAS), yang mempresentasikan profil adat dan peta Partisipasinya adat Noken kepada Bupati Jayapura dan permohonan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat. Namun, sampai saat ini, wilayah umum Nomblong, Kemtuik dan Klis yang dipetakan dengan profil data sosial dan petisi kepada penguasa belum mendapatkan pengakuan penetapan hak melalui keputusan Permendagri No.52 Tahun 2014.

Greenpeace juga melakukan kerjasama dengan Forum Papua Itu Kita yang berfokus dalam HAM beiring mula masukan dan kejian melantaskan Festival Ranipa – Suara Jernih Papua. Acara ini membutuhkan mempopulerkan menjelang menjelang kebanyakan, khususnya kebanyakan perkotaan, perihal aktivitas lokal beiring keberbagian hayati Tanah Papua yang berganduh sepadan pakai kebijakan domestic kelaziman kebnyakan adatnya. Festival ini memiliki rangkaian seperti diskusi publik, pameran seni dan foto, tari tradisional, MOP Papua, dan juga pertunjukkan music. Dengan unu, pengunjung dapan bisa memahami dan mengetahui kecantikan dan kekayaan alam di alam Papua. Charles Toto, koki Papua yang mengkampanyekan sumber daya alam papua melalui kuliner local juga berpartisipasi. Kehidupan masyarakat adat Papua sangat erat dengan sumber daya

⁴⁶ Greenpeace, Di Kanada, Masyarakat Adat Papua Desak Komitmen Pemerintah Selamatkan Hutan, diakses di <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55896/di-kanada-masyarakat-adat-papua-desak-komitmen-pemerintah-selamatkan-hutan/>, diakses pada (15/03/2023 19.00)

alam yang dikelola kebijakan, dan diwariskan ke generasi selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan harian mereka. Namun, perluasan industri perkebunan sawit secara masif yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerisauan masyarakat adat.⁴⁷

Greenpeace bersama masyarakat adat Knasaimos mengajukan permohonan Pengakuan Adat kepada Komite Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan pada 28 November 2023. Rombongan yang beranggotakan perwakilan marga Knasaimos, pemimpin Dewan Persahabatan Adat Knasaimos (DPMA), serta perwakilan Bentara Papua dan Greenpeace Indonesia.

“Kami ingin wilayah tradisional Knasaimos diakui secara hukum. Kami telah lama berjuang untuk melindungi wilayah adat kami dari kebijakan pemerintah yang tidak berdampak pada kami, mulai dari imigrasi, penebangan kayu, hingga kelapa sawit. Hari ini kami berharap pemerintah secara hukum mengakui wilayah adat kami,” kata Fredrik Sagisolo, presiden DPMA Knasaimos.⁴⁸

Pada gugatan kasus pejuang lingkungan hidup suku Awyu, disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

3.3.2 Forest Watch

Greenpeace dan Forest Watch melakukan Kerjasama yang menghasilkan bahwa terdapatutupan pohon di Papua yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit yang menebangi setidaknya 3.700 hektar hutan primer di Kabupaten Boven

⁴⁷ Greenpeace, Festival Suara Jernih Papua, Memahami dan Menyuarakan Papua Lewat Seni dan Budaya, diakses melalui <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56250/festival-suara-jernih-papua-memahami-dan-menyuarakan-papua-lewat-seni-dan-budaya/>, diakses pada (23/03/2023 5:17 WIB)

⁴⁸ Greenpeace, Masyarakat Knasaimos Ajukan Pengakuan Wilayah Adat ke Bupati Sorong Selatan, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57656/masyarakat-knasaimos-ajukan-pengakuan-wilayah-adat-ke-bupati-sorong-selatan/>, (18/01/2024, 00.34 WIB)

Digoel. Forest Watch menemukan bahwa kehilangan hutan yang disetujui untuk produksi kelapa sawit melalui keputusan Menteri tahun 2012. Meskipun kehilangan ini dianggap sebagai deforestasi “terencana” dan legal, penebangan hutan alam wilayah yang begitu luas dapat secara permanen merusak ekosistem dan pada akhirnya mengurangi produktivitas ekonominya. Komunitas-komunitas ini juga beresiko kehilangan layanan ekosistem penting secara permanen, seperti penjernihan udara dan air, yang dapat mengakibatkan beban ekonomi dan Kesehatan tambahan.⁴⁹

Greenpeace dan Forest Watch Indonesia terlibat bekerja sama lagi pada koalisi Perhimpunan Masyarakat Sipil yang melakukan demonstrasi di depan Kantor ATR/BPN, menuntut ATR/BPN mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) karena lebih dari setahun, telah mengabaikan perintah pembukaan MA: n HGU kelapa sawit. Komisi Informasi Provinsi Papua juga memutuskan bahwa informasi HGU perusahaan sawit harus dibuka setelah LBH Papua memenangkan kasus pengungkapan terhadap BPN wilayah Papua.⁵⁰

⁴⁹ Josephine Chitra and Arief Wijaya and Rizky Firmansyah, Balancing Development and Forest Protection in Papua, diakses di <https://www.globalforestwatch.org/blog/commodities/balancing-development-and-forest-protection-in-papua/>, diakses pada (15/03/2023 19:53 WIB)

⁵⁰ Forest Watch Indonesia, BPN Tertutup = Korupsi?, diakses di <https://fwi.or.id/bpn-tertutup-korupsi/>, diakses pada (13/03/2023 20:18 WIB)